

Analysis Of The Regional Government Information System To Improve Employee Performance At BKPSDM In Dairi Regency

Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Di BKPSDM Di Kabupaten Dairi

Minar Berutu¹⁾ ; Ayu Kurnia Sari²⁾

^{1),2)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ minarberutu06@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Juli 2026]

Revised [18 Oktober 2026]

Accepted [20 Oktober 2026]

KEYWORDS

Accountability, Data Accuracy, Information System, Regional Government, SIPD.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

SIPD dibangun untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan berbasis elektronik. Dengan adanya sistem ini, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Pemerintah daerah dituntut mampu menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap keputusan berbasis pada informasi yang valid. Hal ini penting karena kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem akan memengaruhi kualitas perencanaan, pengendalian, serta kinerja organisasi perangkat daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Sistem informasi membantu mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi data, mempermudah penyusunan laporan, memperkuat dokumentasi, dan mendukung pelayanan kepegawaian yang lebih efektif. Namun, keberhasilan penerapan sistem informasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, kestabilan jaringan, integrasi sistem, serta komitmen organisasi.

ABSTRACT

SIPD was developed to provide interconnected, electronic-based regional government information services. This system allows for a more structured planning, budgeting, implementation, administration, reporting, and evaluation process. Regional governments are required to provide accurate, up-to-date, and accountable data so that every decision is based on valid information. This is crucial because the quality of the information generated by the system will impact the quality of planning, control, and performance of regional apparatus organizations. This study used a qualitative approach with descriptive methods. The results showed that the information system helps accelerate work processes, improve data accuracy, simplify report preparation, strengthen documentation, and support more effective personnel services. However, the success of information system implementation is greatly influenced by the quality of human resources, technological infrastructure, network stability, system integration, and organizational commitment.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintahan daerah tidak lagi cukup dikelola secara manual, tetapi harus berbasis data, terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi pemerintahan daerah, termasuk informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya. Regulasi ini menunjukkan bahwa SIPD bukan hanya aplikasi administratif, tetapi instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan terintegrasi.

SIPD dibangun untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan berbasis elektronik. Dengan adanya sistem ini, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Pemerintah daerah dituntut mampu menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap keputusan berbasis pada informasi yang valid. Hal ini penting karena kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem akan memengaruhi kualitas perencanaan, pengendalian, serta kinerja organisasi perangkat daerah.

Dalam konteks organisasi pemerintahan daerah, keberadaan SIPD sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Pegawai tidak hanya dituntut memahami tugas administratif, tetapi juga harus mampu mengoperasikan sistem digital, menginput data secara tepat, menyusun dokumen sesuai prosedur, serta

memastikan kesesuaian data dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan SIPD menuntut adanya perubahan pola kerja pegawai dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi informasi. Perubahan ini berpotensi meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu, akurasi data, dan transparansi kerja pegawai apabila sistem digunakan secara optimal.

BKPSDM Kabupaten Dairi sebagai perangkat daerah yang menangani urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola aparatur pemerintah daerah. Tugas BKPSDM berkaitan dengan pengelolaan data pegawai, pengembangan kompetensi, administrasi kepegawaian, penilaian kinerja, mutasi, promosi, serta pelayanan kepegawaian lainnya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, kualitas data dan kecepatan pelayanan menjadi faktor penting. Oleh karena itu, pemanfaatan sistem informasi, termasuk SIPD, menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas kerja pegawai BKPSDM.

Namun, penerapan SIPD di lingkungan perangkat daerah tidak selalu berjalan tanpa kendala. Dalam praktiknya, penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah sering menghadapi beberapa persoalan, seperti kemampuan pegawai yang belum merata dalam mengoperasikan aplikasi, keterbatasan pemahaman terhadap fitur sistem, kendala jaringan internet, keterlambatan input data, kesalahan pengisian data, serta kurangnya koordinasi antarbidang. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas penggunaan SIPD dan berdampak pada kinerja pegawai, terutama dalam aspek ketepatan waktu, kualitas hasil kerja, akurasi data, dan tanggung jawab pekerjaan. Permasalahan lain yang sering muncul adalah masih adanya pegawai yang menganggap sistem informasi hanya sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai alat kerja strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi. Jika SIPD hanya digunakan sebatas untuk memenuhi kewajiban input data, maka manfaat sistem tidak akan optimal. Sebaliknya, jika SIPD dimanfaatkan secara baik, maka sistem ini dapat membantu pegawai bekerja lebih cepat, mengurangi kesalahan administrasi, mempercepat koordinasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Kinerja pegawai merupakan aspek penting dalam keberhasilan organisasi pemerintahan. Pegawai yang memiliki kinerja baik akan mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target, bekerja secara disiplin, memberikan pelayanan yang responsif, serta menghasilkan data dan dokumen yang akurat. Dalam pengelolaan kinerja ASN, pemerintah telah mengatur penilaian kinerja pegawai melalui PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kinerja pegawai harus dikelola secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil kerja.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2022) menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Informasi Kinerja Kepegawaian Daerah (SI KEKAH) dalam Menunjang Kinerja Pegawai di BKPSDM Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dari analisis peneliti melalui 4 (empat) dimensi efektivitas menurut Hessel NS Tangkilisan yaitu: pencapaian target, kemampuan adaptasi, kepuasan kerja pegawai dan tanggung jawab. Kesimpulan: Dari keempat dimensi tersebut masih ditemukannya kendala antara lain yaitu: 1)Keterbatasan akan pengetahuan teknologi, 2)Kurangnya kesadaran dan disiplin pegawai, 3)Kurangnya pengawasan dan ketegasan atasan. Upayaupaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: 1)Sosialisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan teknologi, 2)Penyempurnaan regulasi,

3)Meningkatkan ketegasan atasan. Kata kunci: Efektivitas, SI KEKAH, Pengelolaan Kepegawaian. Berdasarkan kondisi tersebut, analisis terhadap penerapan SIPD di BKPSDM Kabupaten Dairi menjadi penting dilakukan. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana SIPD telah digunakan dalam mendukung pekerjaan pegawai, kendala apa saja yang dihadapi dalam penggunaannya, serta bagaimana sistem tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai. Penelitian ini juga penting karena keberhasilan sistem informasi pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan organisasi, kualitas data, sarana prasarana, serta komitmen pimpinan dan pegawai dalam menggunakan sistem secara konsisten.

Dengan demikian, penelitian mengenai Analisa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai di BKPSDM Kabupaten Dairi memiliki relevansi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara pemanfaatan sistem informasi pemerintahan daerah dengan kinerja pegawai. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BKPSDM Kabupaten Dairi dalam mengoptimalkan penggunaan SIPD, meningkatkan kompetensi pegawai, memperbaiki proses kerja, serta memperkuat kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

Transformasi digital pada lingkungan pemerintahan juga menuntut adanya perubahan cara pegawai memandang data dan informasi sebagai bagian dari proses kerja. Data yang tersimpan dalam sistem tidak hanya berfungsi sebagai arsip elektronik, tetapi menjadi dasar untuk melakukan koordinasi, pemantauan, penyusunan laporan, serta pengambilan keputusan. Dalam konteks BKPSDM Kabupaten



Dairi, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting karena administrasi kepegawaian berkaitan dengan data aparatur yang harus akurat, diperbarui secara berkala, dan dapat ditelusuri ketika dibutuhkan. Oleh sebab itu, penggunaan SIPD perlu ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme kerja yang membantu pegawai menjaga konsistensi proses, mengurangi pengulangan pekerjaan, dan memperkuat keteraturan dokumentasi dalam pelaksanaan tugas.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi pada dasarnya tidak secara otomatis menghasilkan kinerja yang lebih baik. Manfaat teknologi sangat bergantung pada kemampuan pengguna, kesesuaian sistem dengan kebutuhan pekerjaan, serta kedisiplinan dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Mangkunegara (2017) menempatkan kinerja sebagai hasil kerja yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pelaksanaan tugas, sedangkan Santoso dan Wijaya (2022) membahas pemanfaatan teknologi informasi dalam kaitannya dengan kinerja perangkat. Dengan demikian, ketika SIPD digunakan dalam aktivitas kerja BKPSDM, penilaiannya tidak cukup hanya melihat apakah aplikasi telah tersedia, tetapi juga perlu melihat apakah penggunaan sistem membantu pegawai bekerja lebih cepat, lebih tepat, lebih tertib, dan lebih mampu memenuhi target pekerjaan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kesiapan pegawai menghadapi perubahan proses kerja dari pola manual menuju pola kerja digital. Perubahan tersebut dapat memunculkan kebutuhan baru berupa peningkatan literasi digital, pembiasaan penggunaan aplikasi, kemampuan melakukan verifikasi data, serta koordinasi antarpegawai ketika terjadi perbedaan atau ketidaksesuaian informasi. Purba, Ginting, dan Sucipto (2020) menunjukkan pentingnya penguatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis sistem informasi. Dalam penelitian ini, kesiapan pegawai dipandang sebagai unsur yang ikut menentukan sejauh mana SIPD dapat dimanfaatkan secara konsisten. Sistem yang tersedia akan memberikan manfaat yang lebih optimal apabila didukung oleh pegawai yang memahami fungsi sistem, mampu mengatasi kendala operasional sederhana, dan memiliki komitmen untuk menjaga kualitas data yang dikelola.

LANDASAN TEORI

Studi Literature

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seseorang menerima dan menggunakan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Teori ini dikembangkan oleh Davis (1989) dan banyak digunakan untuk menganalisis penerimaan pengguna terhadap sistem informasi, aplikasi digital, dan teknologi kerja berbasis komputer. Dalam konteks penelitian ini, TAM dapat digunakan untuk menjelaskan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan tugasnya. Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional dan SIPD tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan aplikasi, tetapi juga berkaitan terhadap kemudahan penggunaan, manfaat sistem, sikap terhadap penggunaan sistem, serta dampaknya terhadap kinerja kerja pegawai.

Dalam kerangka *Technology Acceptance Model*, penerimaan terhadap teknologi terutama dapat dipahami melalui persepsi mengenai manfaat dan kemudahan penggunaan. Persepsi manfaat menunjukkan sejauh mana pengguna meyakini bahwa suatu sistem dapat membantu meningkatkan pelaksanaan pekerjaannya, sedangkan persepsi kemudahan berkaitan dengan tingkat keyakinan bahwa sistem dapat digunakan tanpa menimbulkan beban usaha yang berlebihan. Pada lingkungan BKPSDM Kabupaten Dairi, kedua aspek tersebut relevan karena pegawai akan lebih terdorong menggunakan SIPD secara konsisten apabila sistem dipandang dapat mempercepat pekerjaan, memudahkan pencarian data, mendukung penyusunan laporan, dan memiliki alur penggunaan yang dapat dipahami. Sebaliknya, sistem yang dianggap rumit atau tidak memberikan manfaat langsung terhadap tugas berpotensi menurunkan intensitas pemanfaatannya.

Sistem informasi dalam organisasi pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu kesatuan proses yang menghubungkan data, pengguna, prosedur, dan teknologi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pelaksanaan tugas. Dalam penelitian ini, kualitas sistem tidak hanya dilihat dari keberadaan aplikasi, tetapi juga dari kemampuan sistem menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan mudah diakses. Kualitas informasi menjadi penting karena kesalahan pada data awal dapat memengaruhi dokumen, laporan, dan keputusan yang dihasilkan pada tahap berikutnya. Oleh karena itu, kedisiplinan input, pembaruan data, verifikasi, serta pengendalian akses merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung administrasi kepegawaian.

Kinerja pegawai merupakan hasil pelaksanaan tugas yang dapat dilihat melalui kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, ketelitian, tanggung jawab, dan kemampuan menggunakan sumber daya secara efektif. Mangkunegara (2017) menjelaskan kinerja dalam kaitannya dengan hasil kerja yang dicapai pegawai sesuai tanggung jawab yang diberikan. Dalam lingkungan kerja berbasis digital, indikator tersebut juga berkaitan dengan kemampuan pegawai memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk menyelesaikan

pekerjaan. Pegawai yang mampu menggunakan sistem secara tepat memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi kesalahan administrasi, mempercepat akses informasi, dan menjaga keteraturan dokumen. Namun, kinerja tetap dipengaruhi oleh dukungan organisasi, kompetensi pengguna, fasilitas kerja, dan kondisi teknis yang menyertai penggunaan sistem.

Sejumlah penelitian terkait memberikan landasan bahwa pemanfaatan sistem digital dan kemampuan aparatur perlu dipertimbangkan secara bersamaan. Rahmah (2021) membahas kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan berbasis digital, Santoso dan Wijaya (2022) mengkaji pemanfaatan teknologi informasi dalam hubungannya dengan kinerja perangkat, sedangkan Saputra, Wahyudi, dan Kurniawan (2024) menempatkan optimalisasi penggunaan sistem sebagai bagian dari peningkatan kapasitas aparatur. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa teknologi tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan kemampuan pengguna dan proses organisasi. Dalam konteks penelitian ini, keterkaitan tersebut digunakan untuk memahami bahwa peningkatan kinerja melalui SIPD memerlukan sistem yang dapat digunakan dengan baik sekaligus pegawai yang memiliki kompetensi dan kesiapan untuk memanfaatkannya.

Dengan demikian, hubungan antara SIPD dan kinerja pegawai dapat dijelaskan melalui rangkaian proses penerimaan dan pemanfaatan teknologi. Kemudahan penggunaan dapat mendorong pegawai untuk lebih aktif memanfaatkan fitur sistem, sedangkan manfaat yang dirasakan dapat memperkuat keyakinan bahwa sistem membantu pencapaian tujuan pekerjaan. Penggunaan yang konsisten kemudian berpotensi menghasilkan proses administrasi yang lebih efisien, data yang lebih tertib, serta koordinasi yang lebih cepat. Kerangka ini menjadi dasar untuk membaca hasil penelitian mengenai kualitas informasi, kemudahan penggunaan, efisiensi kerja, efektivitas tugas, dan peningkatan kinerja pegawai di BKPSDM Kabupaten Dairi, tanpa memisahkan aspek teknologi dari faktor sumber daya manusia dan dukungan organisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan secara mendalam sistem keuangan desa serta perannya dalam meningkatkan kinerja perangkat desa dalam penyusunan laporan keuangan. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara holistik dengan menekankan pada makna, proses, dan konteks yang terjadi di lapangan, tanpa melakukan pengujian hipotesis atau analisis statistik (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Dairi merupakan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, pengembangan kompetensi aparatur, pelayanan data pegawai, pengurusan kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, disiplin pegawai, serta pelayanan kepegawaian lainnya. Dalam menjalankan tugas tersebut, BKPSDM membutuhkan sistem informasi yang mampu mendukung pengolahan data secara cepat, akurat, tertib, dan terintegrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di BKPSDM Kabupaten Dairi berperan sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengelolaan data kepegawaian. Sistem informasi digunakan untuk membantu pegawai dalam menginput data, mengakses informasi, menyusun laporan, memproses dokumen, serta mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajemen aparatur sipil negara. Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah memberikan perubahan terhadap pola kerja pegawai. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai diarahkan menjadi lebih digital, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Hal ini berdampak pada peningkatan ketertiban administrasi, pengurangan penggunaan dokumen fisik, serta percepatan proses pelayanan internal maupun eksternal.

Kualitas Informasi yang Dihasilkan Sistem

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintahan daerah membantu pegawai dalam memperoleh data dan informasi yang lebih cepat. Informasi yang dihasilkan sistem dapat digunakan untuk mendukung penyusunan laporan, pemantauan data pegawai, serta pelaksanaan tugas-tugas administrasi kepegawaian. Kualitas informasi yang baik terlihat dari beberapa aspek, seperti keakuratan data, kelengkapan informasi, ketepatan waktu, dan kemudahan akses. Pegawai dapat



memperoleh data yang dibutuhkan tanpa harus mencari berkas secara manual. Hal ini membantu mempercepat pekerjaan dan mengurangi risiko kehilangan dokumen. Namun, kualitas informasi masih sangat bergantung pada ketepatan input data. Apabila data awal yang dimasukkan tidak lengkap atau tidak diperbarui secara berkala, maka informasi yang dihasilkan sistem juga dapat menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, kedisiplinan pegawai dalam memperbarui data menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas sistem informasi.

Kemudahan Penggunaan Sistem

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah. Pegawai yang memahami cara menggunakan sistem cenderung lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dan lebih mampu memanfaatkan fitur yang tersedia. Sistem informasi dinilai membantu pegawai apabila tampilan sistem mudah dipahami, menu tersusun dengan jelas, dan alur penggunaan tidak terlalu rumit. Kemudahan penggunaan juga dipengaruhi oleh pengalaman pegawai, pelatihan yang diberikan, serta dukungan teknis dari operator atau bagian yang memahami sistem. Meskipun demikian, masih terdapat pegawai yang membutuhkan pendampingan dalam menggunakan sistem, terutama pegawai yang belum terbiasa dengan aplikasi digital atau fitur tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan digital pegawai tetap diperlukan agar sistem informasi dapat dimanfaatkan secara optimal.

Efisiensi Proses Kerja Pegawai

Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah memberikan dampak terhadap efisiensi kerja pegawai. Sistem membantu mengurangi proses kerja yang berulang, mempercepat pencarian data, memudahkan penyimpanan dokumen, serta mempercepat penyusunan laporan. Sebelum penggunaan sistem informasi, proses administrasi sering memerlukan waktu lebih lama karena data harus dicari melalui arsip fisik atau dokumen manual. Dengan adanya sistem informasi, pegawai dapat mengakses data secara lebih cepat sehingga waktu penyelesaian pekerjaan menjadi lebih singkat. Efisiensi juga terlihat dari berkurangnya penggunaan kertas, meningkatnya kecepatan koordinasi antarbagian, serta kemudahan dalam memantau status pekerjaan. Namun, efisiensi tersebut dapat terganggu apabila sistem mengalami gangguan jaringan, server lambat, atau fitur aplikasi belum berjalan optimal.

Efektivitas Pelaksanaan Tugas Pegawai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintahan daerah mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pegawai di BKPSDM Kabupaten Dairi. Pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target waktu, mengurangi kesalahan administrasi, dan meningkatkan kualitas laporan. Sistem informasi membantu pegawai dalam memastikan bahwa data yang digunakan lebih tertib dan terdokumentasi. Hal ini mendukung akurasi pekerjaan, terutama dalam kegiatan yang membutuhkan ketepatan data kepegawaian. Dengan sistem informasi, proses kerja menjadi lebih terarah karena pegawai dapat mengikuti alur kerja yang telah tersedia dalam aplikasi. Namun, efektivitas sistem masih dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia. Sistem yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila pegawai belum memiliki kemampuan yang memadai dalam menggunakannya. Oleh karena itu, efektivitas penerapan sistem sangat bergantung pada kesiapan pegawai, pelatihan, dukungan pimpinan, dan ketersediaan fasilitas teknologi.

Peningkatan Kinerja Pegawai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan daerah berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pegawai. Peningkatan kinerja terlihat dari beberapa aspek, yaitu meningkatnya kecepatan kerja, ketelitian dalam pengolahan data, ketepatan waktu penyelesaian tugas, serta kemampuan pegawai dalam menyusun laporan secara lebih baik. Kinerja pegawai juga meningkat karena sistem informasi memudahkan koordinasi dan komunikasi kerja. Pegawai dapat mengakses data yang sama, meminimalkan perbedaan informasi, dan mempercepat proses administrasi. Dengan demikian, sistem informasi mendukung terciptanya pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Meskipun demikian, peningkatan kinerja belum sepenuhnya merata pada seluruh pegawai. Perbedaan kemampuan penggunaan teknologi, tingkat pemahaman terhadap sistem, serta kebiasaan kerja manual masih menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan sistem dalam meningkatkan kinerja pegawai.

Pembahasan

Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Mendukung Kinerja Pegawai

Sistem informasi pemerintahan daerah berperan penting dalam mendukung peningkatan kinerja pegawai di BKPSDM Kabupaten Dairi. Sistem ini membantu pegawai dalam mengelola data, mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi informasi, serta mempermudah penyusunan

laporan. Dengan adanya sistem informasi, pekerjaan pegawai menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi. Kinerja pegawai dalam organisasi pemerintahan tidak hanya dinilai dari banyaknya pekerjaan yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas, ketepatan waktu, tanggung jawab, dan kemampuan menggunakan sumber daya secara efisien. Sistem informasi pemerintahan daerah menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu pegawai mencapai indikator kinerja tersebut. Dalam konteks BKPSDM, data kepegawaian harus dikelola secara akurat karena berkaitan dengan hak, status, dan pengembangan karier aparatur sipil negara. Kesalahan data dapat berdampak pada pelayanan kepegawaian. Oleh karena itu, sistem informasi membantu meningkatkan ketelitian dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pegawai. Penerapan sistem informasi pemerintahan daerah dapat meningkatkan efisiensi kerja pegawai karena proses kerja menjadi lebih cepat dan sederhana. Pegawai tidak perlu lagi sepenuhnya bergantung pada arsip fisik atau proses manual yang membutuhkan waktu lama. Data yang tersimpan dalam sistem dapat diakses kembali ketika dibutuhkan. Efisiensi kerja terlihat dari pengurangan waktu pencarian data, percepatan penyusunan laporan, dan pengurangan kesalahan akibat pencatatan manual. Selain itu, sistem informasi juga membantu mengurangi pekerjaan yang bersifat repetitif sehingga pegawai dapat lebih fokus pada tugas analisis dan pelayanan. Namun, efisiensi ini hanya dapat tercapai apabila sistem berjalan stabil. Gangguan teknis seperti jaringan lambat, aplikasi error, atau keterbatasan perangkat dapat menghambat proses kerja. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur teknologi menjadi bagian penting dalam mendukung efisiensi kerja pegawai. Efektivitas kerja pegawai berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan tugas sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Sistem informasi pemerintahan daerah mendukung efektivitas kerja karena menyediakan data yang lebih akurat dan proses kerja yang lebih terarah.

Melalui sistem informasi, pegawai dapat mengetahui tahapan pekerjaan, memantau data, dan menyusun laporan berdasarkan informasi yang tersedia. Hal ini membantu pegawai bekerja lebih terukur dan mengurangi ketidaksesuaian data. Dalam pelayanan kepegawaian, efektivitas sangat penting karena masyarakat internal pemerintahan, yaitu ASN, membutuhkan pelayanan yang cepat dan tepat. Akan tetapi, efektivitas sistem tetap bergantung pada kemampuan pegawai dalam mengoperasikan sistem. Pegawai yang belum terbiasa dengan teknologi cenderung membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem menjadi faktor penting. Salah satu manfaat utama sistem informasi pemerintahan daerah di BKPSDM Kabupaten Dairi adalah peningkatan akurasi data kepegawaian. Data pegawai yang lengkap, benar, dan terbaru sangat penting dalam pengambilan keputusan, seperti mutasi, promosi, kenaikan pangkat, pensiun, dan pengembangan kompetensi. Sistem informasi membantu mengurangi risiko kesalahan pencatatan karena data dapat disimpan dalam format digital dan diperbarui secara berkala. Selain itu, sistem juga memudahkan proses pencarian dan verifikasi data. Dengan demikian, sistem informasi mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Namun, akurasi data sangat bergantung pada kualitas input. Jika pegawai tidak teliti dalam memasukkan data, sistem tetap dapat menghasilkan informasi yang keliru. Oleh sebab itu, penerapan sistem harus disertai dengan pengawasan, validasi data, dan pembaruan informasi secara rutin. Untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui sistem informasi pemerintahan daerah, BKPSDM Kabupaten Dairi perlu melakukan beberapa upaya. Pertama, meningkatkan pelatihan dan pendampingan kepada pegawai agar seluruh pegawai memiliki kemampuan digital yang memadai. Pelatihan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi perlu dilakukan secara berkala mengikuti perkembangan sistem. Kedua, meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet, perangkat komputer, server, dan sistem keamanan data. Infrastruktur yang baik akan mendukung kelancaran penggunaan sistem dalam pekerjaan sehari-hari. Ketiga, memperkuat pengawasan dan evaluasi penggunaan sistem. Pimpinan perlu memastikan bahwa sistem benar-benar digunakan secara optimal dan tidak hanya menjadi formalitas administratif. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat kecepatan penyelesaian tugas, tingkat kesalahan data, dan kepuasan pengguna layanan. Keempat, mendorong budaya kerja digital di lingkungan BKPSDM. Pegawai perlu dibiasakan untuk bekerja berbasis data, menggunakan sistem secara konsisten, dan mengurangi ketergantungan pada dokumen manual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran penting dalam meningkatkan kinerja pegawai di BKPSDM Kabupaten Dairi. Sistem informasi membantu mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi data, mempermudah penyusunan laporan, memperkuat dokumentasi, dan mendukung pelayanan kepegawaian yang lebih efektif. Namun, keberhasilan penerapan sistem informasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, kestabilan jaringan, integrasi sistem, serta komitmen organisasi. Oleh karena itu,

peningkatan kinerja pegawai melalui sistem informasi harus didukung oleh pelatihan, pendampingan, pengawasan, dan pengembangan budaya kerja digital.

Saran

Meskipun sistem informasi memberikan banyak manfaat, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapannya masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain keterbatasan kemampuan sebagian pegawai dalam menggunakan teknologi, gangguan jaringan internet, keterbatasan perangkat pendukung, serta belum optimalnya pelatihan. Adanya kebiasaan kerja manual. Sebagian pegawai mungkin merasa lebih nyaman menggunakan cara lama, sehingga proses adaptasi terhadap sistem digital membutuhkan waktu. Perubahan budaya kerja dari manual ke digital memerlukan komitmen pimpinan dan kesediaan pegawai untuk belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (2024). *Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Malalin Kabupaten Enrekang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Aprilianda, R. T. (2023). *Analisis efektivitas penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam upaya memperlancar pelaporan keuangan desa: Studi kasus pada Desa Banjardowo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang* (Doctoral dissertation, STIE PGRI Dewantara Jombang).
- Aulia, E., Tambunan, K., & Laila, N. (2024). Efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Dana Desa pada Dalu Sepuluh A Tanjung Morawa. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4(1), 59–68.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020a). *Pedoman implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam tata kelola pemerintahan desa*. Jakarta: BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2020b). *Petunjuk teknis Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)*. Jakarta: BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). *Laporan evaluasi nasional implementasi Sistem Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022a). *Pedoman implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi terbaru*. Jakarta: BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2022b). *Evaluasi implementasi Siskeudes berbasis digital dalam penguatan akuntabilitas keuangan desa*. Jakarta: BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2024). *Laporan tahunan pengawasan Dana Desa dan implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan*. Jakarta: BPKP.
- Ginting, C. S. B., Sihombing, M., Kartika, M., Lestari, S. R., Nizrina, W., & Sucipto, T. N. (2024). Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Pemeriksaan Pajak. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 2481-2488.
- Indonesia, P. R. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa*. Jakarta: Kemendagri.
- Mangkunegara, A. A. P. (2017). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maknun, L., Ayu, I., Fadhillah, N., & Munir, S. (2025). Analisis penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0 terhadap kinerja perangkat desa Babat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(4), 76–82.
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada organisasi pemerintahan desa: Studi kasus di Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4).
- Milanie, F., Sari, A. K., & Saputra, H. (2020). Analysis Of Effect Human Relations And Working Environment Conditions on Employee Work Ethics At The Office Social Security Administering Agency (BPJS) Binjai. *Journal Homepage: http://ijmr. net. in*, 8(04).
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pujiani, E. S., & Astuti, W. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa: Studi kasus pada Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. *Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 598–607.
- Purba, R., Ginting, R. M. H., & Sucipto, T. N. (2020). Pelatihan Keahlian Sumber Daya Manusia Berbasis Sistem Informasi Akuntansi Pada Siswa Training Di LPK Mitra Sauri Medan. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 1(1), 1-9.
- Rahmah, N. (2021). Kinerja aparatur desa dalam pengelolaan keuangan berbasis digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 112–121.

- Santoso, R., & Wijaya, B. (2022). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja perangkat desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 44–56.
- Saputra, A., Wahyudi, B., & Kurniawan, R. (2024). Optimalisasi penggunaan Siskeudes dalam peningkatan kapasitas aparatur desa. *Jurnal Pengelolaan Keuangan Desa*, 6(1), 45–57.
- Saputra, A., & Panjaitan, F. (2024). Peran Sistem Keuangan Desa Online (Siskeudes) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas.
- Sinulingga, J. I. S. B. (2024). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Desa Perkebunan Amal tani Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Fakultas Sosial Sain).
- Siregar, A., & Putri, D. (2021). Pengaruh penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap akuntabilitas keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 112–121.
- Sucipto, T. N. (2023). Praktik Akuntansi Aset Tetap di BKAD Kota Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3524-3537.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 50-58.
- Wibowo, H. T., Triyanto, D., & Sutojo, A. (2020). Implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 2.0 di Desa Guru Agung 1, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 152–165.